

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Abu Daud Busroh, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Andi Setiawan, dkk. *Pengantar State Auxiliary Agency*. Malang: UB Press, 2015.
- Angger dan Meylani. *Pengawasan terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Asmara, Galang. *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, 2016.
- Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada, 2017.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Juniarso dan Achmad. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Lembaga Administrasi Negara RI, *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1992.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, 2005.
- Nurchotimah, A.S. *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

- Nyimas, dkk. *Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Patarai, Idris. *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makassar: De La Macca, 2015.
- Paulus Effendie Lotulung. *Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi – Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Jakarta: PT. Bhuana Pancakarsa, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- R.M. Surachman dan Antonius Sujata. *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Sebuah Antologi*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Rony Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sujata, A. *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

## 2. Jurnal

- Desiana, Ayu. "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik" 6, no. 2 (2013): 172-192. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2125>.
- Dyah Hariani dan Tri Yanti Nur Irson Sitorus, "Analisis Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Rangka Penanganan Laporan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (Maret 4, 2019): 33. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.34>
- Fernandus, S., Upik, H., & Marlia, E.P. "Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Penyelesaian Laporan Atas Dugaan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara* 5, no. 2. (May 24, 2019): 4-10. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/13215>
- Iswandir, "Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi," *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 1, no. 1 (2014): 68-76, <https://doi.org/10.35968/jsi.v1i1.34>.
- Izzati, N.F. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia," *SASI*, no. 2 (April-Juni, 2020): 176-187, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235>.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar,"Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni, 2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Mustika. "Peran Ombudsman dalam Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Pelayanan yang Baik (Kajian di Provinsi Sulawesi Utara)". *Lex Et Societatis*, no. 3 (Mei, 2018): 21-30, <https://doi.org/10.35796/les.v6i3.19572>.
- Marianus dan Willy, "Ombudsman Strategy of Republic of Indonesia In East Java Representative Regarding Public Service Supervision," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2019): 31-32. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i3.1782>.

Regina Angelita Br Sebayang and Hartati Hartati, "Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 2 (2021): 63-75, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428>

Yusnani Hasjimzoem, "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no 2 (2014)

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

#### **4. Internet**

Begini Cara Buat Aduan Seleksi CASN 2021 ke Ombudsman (2021, Agustus 4). Diakses pada 15 Februari 2024.  
<https://ombudsman.go.id/news/r/begini-cara-buat-aduan-seleksi-casn-2021-ke-ombudsman>

Ombudsman Jateng Awasi Pelaksanaan Tes SKD CPNS Kemenkumham (2021, November 2). Diakses pada 15 Februari 2024.  
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-jateng-awasi-pelaksanaan-tes-skd-cpns-kemenkumham>

Ombudsman Jateng Tuntaskan Pengaduan Seleksi CPNS Rembang (2021, Agustus 10). Diakses pada 28 Januari 2024.  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--ombudsman-jateng-tuntaskan-pengaduan-seleksi-cpns-rembang>

Ombudsman RI Buka Posko Pengaduan Seleksi CASN 2021 (2021, Agustus 3). Diakses pada 13 November 2023.  
<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-buka-posko-pengaduan-seleksi-casn-2021>

Ombudsman RI Terima 375 Aduan Masyarakat Terkait Seleksi CASN 2021 (2022, Juni 16). Diakses pada 13 November 2023.  
<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-375-aduan-masyarakat-terkait-seleksi-casn-2021>

Visi dan Misi. Diakses pada 29 Januari 2024.  
<https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfvm>

## LAMPIRAN



**PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
Jl. Siwalan Nomor 5, Wonodri, Kota Semarang Telp/Fax (024) 8442627  
website: [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

Nomor : B/518/HM.02.03-14/XII/2023 27 Desember 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan Permohonan Izin Riset/Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro  
di Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 1390/UN.7FI/AK/XI/2023 mengenai permohonan izin penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memberikan izin penelitian dimaksud kepada:

NO	Nama	NIM	Keterangan
1.	Evita Asiyah mawar Diani	1100012012018	Hukum Tata Negara

Selanjutnya untuk berkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengambilan data tersebut dapat menghubungi Staf Sekretariat Ombudsman, Sdr. Alfadi Pratama di nomor 024-8442627/081379795252.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Siti Farida